

OPINI



Pengakuan Angie

Akhirnya Angelina Sondakh buka suara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus Wisma Atlet SEA Games 2011, Angie—panggilan Angelina Sondakh—memang memilih tutup mulut dan hanya berdiam diri di rumah. Namun, kepada harian *Seputar Indonesia* (SINDO) dia berani berbicara kemarin. Angie belum menunjuk pengacara untuk mendampingi pada pemeriksaan nanti. Dia juga mengaku siap bersikap kooperatif terhadap KPK. Seperti yang telah diduga, Angie membantah semua pengakuan Muhammad Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang.

Semua pihak pantas menghormati bantahan Angie karena asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi dalam kasus hukum. Angie mengaku sama sekali tidak pernah berbicara kepada Nazaruddin dan Rosa mengenai proyek Wisma Atlet SEA Games 2011, apalagi sampai mengatur dan menerima uang dari proyek tersebut. Pernyataan Angie dengan Nazaruddin dan Rosa tentu bertolak belakang sama sekali.

Kondisi ini yang harus diperhatikan KPK. Lembaga yang dipimpin Abraham Samad ini harus mampu mencari kebenaran dari dua pernyataan yang berbeda terhadap kasus besar di negeri ini. Langkah KPK dengan menetapkan Angie sebagai tersangka pantas diberi apresiasi. Angie adalah pejabat di partai politik yang saat ini tengah berkuasa. Namun, tantangan KPK bukan hanya berhenti dengan menetapkan seorang tokoh partai politik sebagai tersangka, melainkan mengungkap tabir misteri kasus ini.

KPK tentu mempunyai kemampuan untuk mengungkap tabir misteri tentang kasus proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 ini. Abraham Samad, ketua KPK, pun mengakui bahwa penetapan Angie sebagai tersangka merupakan pintu masuk untuk mengembangkan kasus ini. Banyak pihak yang berharap pernyataan Abraham tersebut bukan hanya pemanis sesaat, melainkan menjadi kenyataan.

Mengungkap kasus ini telah menjadi harapan masyarakat. Masyarakat akan menunggu, apakah KPK berhasil mengungkap kasus Wisma Atlet SEA Games 2011 atau justru menghentikan kasus ini di tengah jalan? Ini yang menjadi tantangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus bak memakan sepiring bubur dan kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 adalah sepiring bubur panas. Jika salah dalam "menyantap"-nya, kasus ini bisa-bisa dimuntahkan lagi. Ini yang masyarakat tidak mau.

Bak makan bubur panas, KPK memang harus memakan dari pinggirnya dulu lalu menghamburkan di tengahnya. Saat ini bagian pinggir dari bubur panas ini sudah masuk ke mulut KPK. Apakah akan berlanjut hingga ke tengah nanti? Hadangan berupa intervensi politik sudah ada di depan mata. Jika sebelumnya lebih banyak orang di luar parpol yang dijerat, setelah ini mungkin akan lebih banyak tokoh parpol yang bisa dijerat. KPK bahkan didesak untuk masuk dan memeriksa pimpinan Badan Anggaran (Bangar) DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Setelah ini tekanan politik terhadap pengungkapan kasus ini semakin kuat. KPK tentu sudah menyadari ini. Dibutuhkan *endurance* dari pimpinan KPK untuk terus menyantap bubur panas ini hingga tuntas. Keberhasilan KPK dalam menuntaskan kasus ini akan menjadi prestasi besar bagi formasi baru pimpinan lembaga antikorupsi ini. Kita yakin, jika KPK berhasil keluar dari tekanan politik dan mengungkap kasus ini secara tuntas, kepercayaan masyarakat tentang upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat.

Semua kembali kepada KPK. Masyarakat hanya bisa mengamati bagaimana KPK menyantap bubur panas tersebut. Mungkin bubur panas itu akan membakar lidah KPK, namun jika mampu dituntaskan, rasa panas itu akan hilang. Jangan sampai KPK berhenti menyantap bubur panas tersebut karena tekanan politik. Karena jika tidak tuntas, sisa bubur panas itu akan tertumpah kepada KPK. ●

Pertumbuhan dan Defisit Kesejahteraan

AHMAD ERANI
YUSTIKAGuru Besar Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya,
Direktur Eksekutif Indef

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan secara lengkap kinerja ekonomi 2011. *Pertama*, laju pertumbuhan ekonomi 2011 mencapai 6,5%. Dengan pertumbuhan sebesar itu, produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar Rp7.427 triliun. Jika dibagi dengan jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk Indonesia 2011 sebesar USD3.542. Pendapatan per kapita itu meningkat 17,7% daripada tahun sebelumnya sebesar USD3010.

Kedua, secara sektoral donasi terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan (24,3%); pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (14,7%); perdagangan, hotel, dan restoran (13,8%); pertambangan dan penggalian (11,9%); konstruksi (10,2%); jasa-jasa (10,5%); keuangan, real estat, dan jasa perusahaan (7,2%); pengangkutan dan komunikasi (6,6%); serta listrik, gas, dan air bersih (0,8%). Data ini memperlihatkan sektor industri dan pertanian (dalam arti luas) masih menjadi penyokong terbesar ekonomi nasional.

Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi pertumbuhan sektoral, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 10,7%; diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran 9,2%; serta sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan 6,8%. Sementara itu, sektor industri pengolahan tumbuh 5,56%, meningkat dari 2010 yang tumbuh 4,5%. Hal yang sama juga terjadi di sektor pertanian, yang pertumbuhannya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, pola pertumbuhan sektoral melanjutkan tradisi beberapa tahun terakhir yang didominasi *non-tradeable* sector. Pertumbuhan ekonomi

yang dicapai pada 2011 tersebut meneruskan tradisi pertumbuhan ekonomi di atas 6% sejak 2007, kecuali diinterupsi pada 2009 akibat krisis ekonomi dunia. Pada 2007 pertumbuhan ekonomi 6,35%; setelah itu pada 2008 (6,02%), 2009 (4,63%), dan 2010 (6,19%). Meskipun pertumbuhan ekonomi ini relatif tinggi, banyak pihak yang belum puas karena sebetulnya peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terbentang luas. Namun, akibat kegagalan pemerintah membangun infrastruktur, kelambanan perizinan, dan kerumitan pembebasan lahan membuat kegiatan ekonomi tidak bisa dijenjot secara cepat.

Problem pertumbuhan bisa dilihat dari struktur sumbangan sektoral. Sektor industri pengolahan donasinya terhadap PDB terus merosot sejak lima tahun terakhir. Pada 2009 misalnya sektor tersebut masih menyumbang 26,4% terhadap PDB, tapi pada 2011 turun tinggal 24,3%. Sektor pertanian juga jatuh sumbangannya, pada 2010 masih sebesar 15,3%, tapi pada 2011 tinggal 14,7%. Khusus sektor pertanian ini sebetulnya tidak terlalu masalah kontribusinya terhadap PDB menurun asalkan diikuti dengan penurunan beban tenaga kerja di sektor tersebut. Masalahnya penurunan kontribusi terhadap PDB tidak selaras dengan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Dalam situasi di mana masalah pengangguran menjadi isu pembangunan saat ini, penurunan donasi sektor industri pengolahan dan pertanian terhadap PDB merupakan berita buruk karena kedua sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Intensitas Ketimpangan

Dengan seluruh gambaran kinerja makroekonomi 2011 tersebut, di dalamnya masih menyembulkan soal lama yang tidak terurai hingga kini, yaitu soal ketimpangan. Ketimpangan di Indonesia bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu ketimpangan sektoral, daerah, dan individu. Ketimpangan sektoral sudah terlihat dengan jelas dari paparan di atas. Sektor *non-tradeable* tumbuh tinggi, tapi hanya menampung sedikit tenaga kerja sehingga mereka yang terlibat di dalamnya menikmati pendapatan yang tinggi. Hal yang berbeda terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian (*tradeable*) yang tumbuh rendah, namun penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Konsekuensinya, mereka yang terlibat di kedua sektor itu hanya menerima pendapatan yang rendah.

Narasi tersebut ditopang oleh data rasio gini/RG (untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk) yang terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2010 lalu RG sudah mencapai 0,37; padahal pada masa sebelum krisis ekonomi 1998 RG di Indonesia tidak pernah mencapai lebih dari 0,33 (semakin tinggi RG menunjukkan ketimpangan yang makin hebat). Dengan tambahan data ini, kenaikan pendapatan per kapita

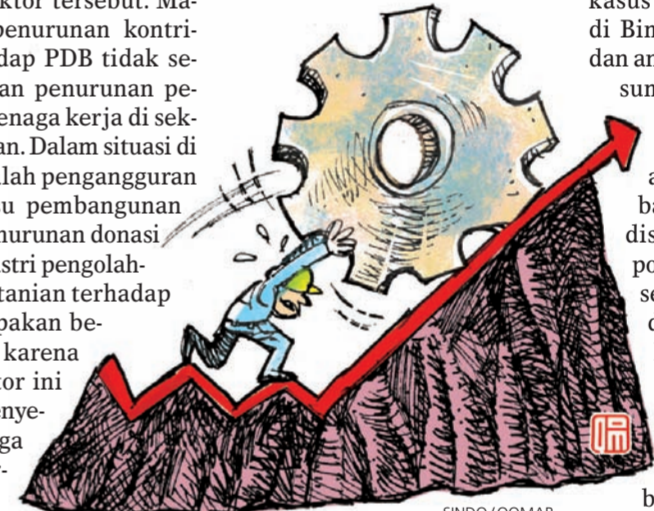
yang terus berlangsung dari tahun ke tahun sebetulnya tidak banyak berarti karena peningkatan kenaikan itu hanya sebagian kecil masyarakat.

Sementara itu, ketimpangan daerah/regional juga masih langgeng. Pulau Jawa menyumbang 57,6%, Sumatra 23,5%, Kalimantan 9,6%, Sulawesi 4,6%, dan wilayah lain 4,7%. Dari aspek demografis, data-data ini sebetulnya kurang menimbulkan persoalan karena jumlah penduduk memang sebagian besar berdiam di Jawa dan Sumatra. Namun, dari sisi keadilan/ketahanan wilayah, data itu menimbulkan masalah genting (secara politik).

Situasi tersebut pada akhirnya lebih banyak menerbitkan kecemasan ketimbang kegembiraan dalam memperoleh masa depan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan bila sebagian besar masyarakat turut serta dalam gerbong pembangunan. Sebaliknya, jika sebagian besar masyarakat tergelincir dalam kegiatan ekonomi, berpotensi memunculkan *social distrust* kepada pemerintah.

Nilah yang pada gilirannya akan meruntuhkan kredibilitas pemerintah dan mengganggu kegiatan ekonomi, yang sebagian sudah dapat dirasakan sekarang, seperti kasus Mesuji, pertambangan di Bima, pemogokan buruh, dan aneka peristiwa yang ber-sumber dari defisit kesejahteraan ekonomi rakyat. Jika pemerataan pendapatan/pembangunan ini tidak lekas disantuni, perhelatan politik 2014 (jika memang sesuai jadwal) pasti akan dihantui dengan isu kerusuhan sosial akibat ketimpangan ekonomi. Celakanya, waktu pemerintah untuk berbenah sangat terbatas! ●

Pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan bila sebagian besar masyarakat turut serta dalam gerbong pembangunan. Jika sebaliknya, berpotensi memunculkan *social distrust* kepada pemerintah.



SINDO/QOMAR



Pemimpin Umum: Hary Tanoesoedibjo

Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Syafril Nasution

Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Suparman, Priscilla Diana Airlin

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Sururi Alfardus

Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto Redaktur Pelaksana: Djaka Susila, Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra, Dwi Sasongko, Masirom Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Aliviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Aziz, Boy Iskandar, Danang Arradian, Hatim Warabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurholis, Shalahuddin, Sujoni, Supriyadi, Syahrir Rasyid, Widaningsih, Wury Hardiansi, Yoni Adnyansa, Zen Tegeh Trivibowo Asisten Redaktur: Abdul Harris, Abdul Rochim, Adam Prawira, Ahmad Baidowi, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Andri Dwi Ananto, Anton Chrisbiyanto, Chamad Hojin, Donatus Nador, Edi Purwanto, Edi Yulianto, Estu Santoso, Fakhur Haqiqi, Hanna Farhana, Harley Ikhsan, Hatta Sujatmin, Helmi Firdaus, Hermanto, Herita Endriana, Hendri Irawan, Kastolani, Ma'ruf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibudin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Hendrawan, Pajjo, Pugeran Ahmad Nurdin, Pughu Hariyanto, Rakhat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Sazili Mustafa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sugeng Wahyudi, Surya Mohammad Said, Sunu Hastoro Fahrurrozi, Suwandi, Syafrudin, Tedy Achmad, Thomas Pulungan, Tri Sutinah Abridawaty, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yogi Pasha

Reporter: Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Fefy Dwi Haryanto, Haryudi, Hendrati Hapsari, Helmi Syarif, Hermansah, Inda Susanti, Islahuddin, Juni Triyanto, Kholid Rokhman, Krisandi Sacawiasastra, M Purwadi, Maasaroh, Meigia, MIN Latief, Muhammad Sahlan, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu Lestika K, Nurul Huda, Rudi Saputra, Rahmat Sahid, Ratnasari Syarif, Rendra Hanggara, Roni Padiasi, Sri Noviani, Susi Susanti, Sofian Dwi, Sucipto, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah, Wahyu Argianto, Wisnoe Moerti

Manager Litbang: Wiendy Hapsari

Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad

Koordinator Fotografer: Aziz Indra

Fotografer: Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Eko Purwanto, Hashiloh Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto

Manager Artistik: Wisnu Handoko

Direktur Sirkulasi & Distribusi: Sugeng H. Santoso

GM Sales: Lia Marlina, Kiki Subarkah

GM Marketing & Communications: Caecilia Hamzah

GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan

Rate iklan 2011 untuk edisi hari Sabtu-Kamis:
Display FC: Rp107.000/mmk, Display BW: Rp70.800/mmk, Display Spot Colour: Rp82.400/mmk, Halaman 1: Rp176.900/mmk, Halaman 3: Rp112.500/mmk, Halaman 5: Rp112.500/mmk, Halaman 7: Rp110.200/mmk, Halaman Cover Lifestyle, Sport, Referensia, Ekonomi dan Bisnis: Rp127.300/mmk FC, Creative Ad/Island Ad: Rp42.100/mmk FC, Center spread: Rp116.100/mmk FC, Laporan Keuangan/Prospektus/Neaca FC: Rp43.000/mmk, BW: Rp39.700/mmk, Sosial/Duka Cita FC: Rp92.700/mmk, BW: Rp39.700,-.

Rate iklan 2011 untuk edisi hari Jumat:
Display FC: Rp117.000/mmk, Display BW: Rp78.000/mmk, Display Spot Colour: Rp91.000/mmk, Halaman 1: Rp195.000/mmk, Halaman 3: Rp124.000/mmk, Halaman 5: Rp124.000/mmk, Halaman 7: Rp124.000/mmk, Halaman Cover Lifestyle, Sport, Referensia, Ekonomi dan Bisnis: Rp140.000/mmk FC, Creative Ad/Island Ad: Rp42.100/mmk FC, Center spread: Rp128.000/mmk FC, Laporan Keuangan/Prospektus/Neaca FC: Rp47.000/mmk, BW: Rp44.000/mmk, Sosial/Duka Cita FC: Rp102.000/mmk, BW: Rp44.000, Iklan Kolom BW: Rp46.500/mmk, Baris: Rp51.500/mmk

Layanan Langganan: (021) 3911518, Fax: (021) 3929758

Iklan Display: (021) 3915634, Fax: (021) 3927721

Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: MNC Tower Lt 9, Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19

Jakarta Pusat, Telepon: (021) 3914672, Fax: (021) 3927721

E-mail: redaksi@seputar-indonesia.com, c@seputar-indonesia.com

iklankolom@seputar-indonesia.com; iklanbaris@seputar-indonesia.com

Penerbit: PT Media Nusantara Informasi, Percetakan: PT Media Nusantara Press

Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5,

Anggota SPS Nomor 404/2005/11/2011, Terbit Tujuh Kali Seminggu.

Alamat: MNC Tower Lt. 22, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta 10340.

Telepon (Hunting): (021) 3926955, Fax: (021) 3929758,

Redaksi: (021) 3926955, Fax: (021) 3927721

Wartawan Seputar Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber

Menyelamatkan Martabat DPR dan Profesi Politisi

VISHNU
JUWONOKandidat Doktor bidang Sejarah
Internasional di London School of
Economics and Political Science
(LSE), London, Inggris, sebagai
Jardine Scholar. Penulis dapat
dihubungi di v.juwono@lse.ac.uk

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad baru saja mengumumkan bahwa Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus Wisma Atlet serta I Wayan Koster dicekal untuk perjalanan ke luar negeri. Bisa dikatakan ini menjadi salah satu momen semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini karena keduanya mewakili dua partai besar, yaitu pendukung utama pemerintah yakni Partai Demokrat serta partai oposisi terbesar yaitu Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP).

Penetapan tersangka terhadap anggota DPR yang melibatkan hampir seluruh anggota partai baik dari pihak pendukung pemerintah serta oposisi bukan yang pertama kali. Sebelumnya KPK juga menetapkan tersangka Miranda S Goeltom mantan pejabat tinggi Bank Indonesia sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat. Dalam rangkaian kasus itu beberapa anggota DPR baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi yang berasal dari partai pendukung maupun oposisi pada periode 1999-2004 divonis bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

Namun, melalui tulisan ini, saya tidak bermaksud membahas teknis hukum. Yang ingin saya analisis melalui tulisan ini adalah apakah yang menyebabkan kasus institusi DPR mempunyai *image* yang buruk di masyarakat terutama melalui pemberitaan-pemberitaan media khususnya selama lima tahun terakhir ini. Harapannya mencari solusi untuk memperbaiki serta menyelamatkan badan negara yang mempunyai peran

penting dalam menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia ini.

Tekanan Situasi

Seperti yang kita ketahui pada masa Orde Baru, kekuatan sangat berpusat pada eksekutif. Anggota DPR dipilih setelah melalui proses seleksi latar belakang yang ketat dilakukan oleh ABRI (saat ini bernama TNI), serta aparat eksekutif yang menjadi instrumen pendukung kekuasaan Presiden Soeharto. Hasilnya, tidak mengherankan bahwa DPR pada masa Orde Baru tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan selayaknya badan legislatif secara optimal.

Namun, dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 1998 dorongan untuk memberdayakan peranan Dewan Perwakilan Rakyat semakin besar. Melalui amanat Undang-Undang Dasar 1945 telah dielaborasi secara gamblang pada Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (yang merupakan hasil amandemen kedua) bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. DPR memiliki wewenang yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Namun, seperti yang kita ikuti melalui berbagai berita di media bahwa wewenang yang lebih besar dari parlemen tersebut tidak diikuti kinerja yang membaik dari para bagian anggota DPR. Sebaliknya, terdapat persepsi dari masyarakat bahwa anggota DPR menggunakan wewenang tersebut untuk kepentingan kelompok atau bahkan untuk memperkaya diri.

Masalah besar dari kelemahan kualitas anggota DPR menurut penulis adalah di-

mulai pada sistem rekrutmen kandidat anggota DPR. Sistem pemilu proporsional terbuka sejak 2009 merupakan kemajuan di mana masyarakat dapat memilih langsung kandidat yang diajukan partai politik. Namun, kandidat harus menghadapi politik biayanya yang miliaran rupiah. Akibatnya yang mampu menjadi kandidat adalah yang memiliki dana besar atau yang mempunyai tingkat popularitas tinggi. Dalam skenario yang sangat ekstrem hanya kandidat berlatar belakang pengusaha, pengacara, serta artis bintang televisi atau musik yang populer yang pada akhirnya dapat maju dan mendapat dukungan partai politik (parpol) untuk menjadi anggota DPR.

Tentu saja bila mengacu pada politisi di negara lain seperti di Amerika Serikat ada contoh kasus di mana mantan bintang film yang dapat mencapai sukses gemilang di dunia perpolitikan seperti almarhum Presiden Ronald Reagan pada 1981-1989. Namun perlu diingat bahwa Presiden Reagan telah malang melintang di dunia perpolitikan Amerika Serikat selama puluhan tahun di antaranya menjadi Gubernur California pada 1967-1975.

Pembiayaan parpol saat ini juga menjadi permasalahan krusial. Diperkirakan dana operasional partai politik untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia mencapai ratusan miliaran rupiah. Dengan demikian, anggota DPR yang juga merupakan pengurus parpol ditekankan untuk menggalang dana operasional dengan menggunakan otoritasnya sebagai anggota DPR tidak terhindarkan. Kesalahan tentu saja tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya

kepada anggota DPR. Diperlukan aturan hukum yang jelas mengenai mekanisme yang legal untuk penggalangan dana parpol.

Melangkah ke Depan

Mengacu pada survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Mei 2011, mayoritas masyarakat Indonesia (77,3%) mendukung sistem demokrasi serta percaya bahwa sistem demokrasi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa (sebanyak 67,9%). Sistem demokrasi di sini tentu saja di antaranya lembaga DPR yang menjalankan fungsi secara benar dalam mengawasi eksekutif. Merupakan tugas bersama, terutama para anggota DPR periode ini, untuk merawat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem demokrasi.

Saya percaya bahwa sebagian besar pimpinan parpol serta pimpinan dan anggota DPR periode 2009-2014 pada dasarnya masih mempunyai keinginan untuk meningkatkan karya di masa tugas mereka sehingga mereka dapat dikenang dan diingat oleh generasi penerus bangsa Indonesia. Untuk itu, mereka harus mencari solusi terhadap masalah rekrutmen kader politik serta pembiayaan parpol. Dengan begitu, anggota DPR periode 2009-2014 serta pimpinan parpol saat ini mempunyai potensi untuk dikenang sebagai peletak fondasi dari sistem politik yang menghasilkan kembali politisi-politisi Indonesia yang mempunyai kaliber hebat seperti para *founding fathers* bangsa kita seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Perdana Menteri Sjahrir, serta Perdana Menteri Mohammad Natsir. ●

Terdapat persepsi dari masyarakat bahwa anggota DPR menggunakan wewenang tersebut untuk kepentingan kelompok atau bahkan untuk memperkaya diri.